

PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEBAGAI INSTRUMEN TRANSPARANSI KEUANGAN DI PERGURUAN TINGGI SWASTA

Renita Felmadefi ^{1*)}; Juanda Astarani ²⁾; Khristina Yunita ³⁾; Nina Febriana Dosinta ⁴⁾

- 1). Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak
email: renitafelmadefi@gmail.com
- 2). Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak
email: juanda.atarani@ekonomi.untan.ac.id
- 3). Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak
email: khristina.yunita@ekonomi.untan.ac.id
- 4). Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura Pontianak
email: nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id

*Corresponding email: renitafelmadefi@gmail.com

Abstract

Financial transparency has become a critical governance issue for private higher education institutions (PHEIs) in Indonesia, where financial dependence on student tuition fees exposes weaknesses in accountability and legitimacy. This study explores the urgency of implementing an integrated Accounting Information System (AIS) as a strategic response to overcome manual financial reporting, data inconsistency, and information asymmetry between management and foundations. Adopting a qualitative case study approach, the research was conducted at a private higher education institution in Pontianak through in-depth interviews, documentation analysis, and observation. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model to identify patterns and theoretical linkages among stakeholders. The findings reveal that the absence of an integrated AIS leads to delays, reporting inaccuracies, and weak internal control, reflecting agency problems and limited adherence to good governance principles. From the perspectives of Agency Theory, Stakeholder Theory, and Good Governance Theory, AIS is not merely an administrative tool but a transformative governance instrument that strengthens transparency, accountability, and stakeholder trust. The study implies that digitalizing accounting systems in PHEIs is essential for reducing information asymmetry, improving institutional legitimacy, and advancing financial governance practices within Indonesia's higher education sector.

Keyword:

Accountability, Accounting Information System, Financial Transparency, Good Governance, Private Higher Education

PENDAHULUAN

Transparansi keuangan di PTS merupakan isu strategis dalam tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Peningkatan biaya pendidikan mendorong tuntutan akuntabilitas terhadap penggunaan dana mahasiswa sebagai sumber utama pendapatan institusi. (Permatasari et al., 2024) menegaskan bahwa pengembangan SIA pendidikan berperan penting dalam menjaga legitimasi PTS melalui transparansi, sementara (Susilo & Aritonang, 2025) menunjukkan bahwa keterlambatan laporan keuangan serta lemahnya dokumentasi dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.

SIA diakui sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. (Rani & Pratolo, 2024) menunjukkan bahwa SIA bukan hanya berfungsi sebagai pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen transparansi yang didukung teknologi *blockchain*, sedangkan

(Febrianda et al., 2025) membuktikan bahwa penerapan SIA mampu mempercepat distribusi informasi keuangan, sehingga memperkuat akuntabilitas institusi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Permatasari et al., 2024) yang mengembangkan sistem akuntansi pendidikan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun penelitian mengenai SIA dan transparansi keuangan telah banyak dilakukan di sektor pemerintah, perusahaan, maupun organisasi nirlaba (Ekasari et al., 2024);(Susilo & Aritonang, 2025) kajian pada PTS masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada instansi pemerintah atau perguruan tinggi negeri yang memiliki sistem keuangan lebih mapan (Nasir et al., 2025) sedangkan karakteristik unik PTS seperti ketergantungan pada dana mahasiswa, variasi tata kelola yayasan, serta risiko asimetri informasi belum banyak dieksplorasi. Studi terbaru tentang PTS lebih menyoroti aspek kesiapan teknologi, misalnya adopsi *blockchain* dalam SIA (Rani & Pratolo, 2024);(Febrianda et al., 2025) tetapi belum menelaah secara mendalam implementasi praktisnya di PTS.

Kesenjangan ini semakin mendesak mengingat tantangan unik yang dihadapi PTS. Hal serupa ditunjukkan oleh (Hanida et al., 2024) bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip fundamental bagi organisasi nirlaba, di mana keterbukaan laporan keuangan merupakan sarana utama untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan pertanggungjawaban pengelolaan dana. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa pencatatan manual, keterlambatan pelaporan, dan lemahnya dokumentasi (Susilo & Aritonang, 2025). Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan, manipulasi data, dan menurunnya kepercayaan stakeholder.

Di sisi lain, perkembangan teknologi menghadirkan peluang baru. (Rani & Pratolo, 2024) menunjukkan kesiapan PTS di Indonesia dalam mengadopsi teknologi *blockchain* untuk memperkuat transparansi laporan keuangan, meski implementasinya masih terbatas. (Febrianda et al., 2025) menambahkan bahwa inovasi teknologi dapat meningkatkan integritas informasi keuangan, namun kesiapan organisasi dan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama. Sejalan dengan itu, (Astarani, 2014) menambahkan bahwa keberhasilan adopsi sistem informasi sangat ditentukan oleh penerimaan pengguna, yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem, sebagaimana dijelaskan melalui kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM).

Untuk memberikan gambaran empiris yang lebih konkret, penelitian ini mengambil studi kasus pada salah satu PTS bidang farmasi di Pontianak. Kasus ini dipilih bukan untuk mewakili seluruh PTS secara statistik, tetapi untuk merefleksikan fenomena umum yang banyak dialami PTS lain di Indonesia yang masih mengandalkan pencatatan manual dan menghadapi kendala transparansi.

Berdasarkan kondisi tersebut, novelty penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap PTS, yang selama ini masih jarang dieksplorasi dalam literatur akuntansi. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran SIA sebagai instrumen transparansi keuangan dalam konteks pendidikan tinggi swasta di Indonesia, dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali praktik nyata dan menemukan pola implementasi yang belum banyak diungkapkan penelitian sebelumnya.

Secara eksplisit, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran SIA sebagai instrumen transparansi keuangan di PTS, dengan fokus pada implementasi praktis dan dampaknya terhadap akuntabilitas lembaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan Sistem Informasi

Akuntansi (SIA) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada PTS. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali proses, makna, serta dinamika sosial dan organisasional yang terkait dengan tata kelola keuangan di lembaga pendidikan tinggi. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada salah satu PTS bidang farmasi yang ada di Kota Pontianak. Institusi ini dipilih secara purposif karena masih menerapkan sistem pencatatan keuangan secara manual dan belum memiliki SIA yang terintegrasi, sehingga kondisi tersebut relevan untuk menelaah urgensi penerapan sistem digital dalam upaya mewujudkan transparansi keuangan.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang mewakili unsur manajerial, operasional, dan pengawasan keuangan, termasuk pihak yayasan, kepala bagian keuangan, bendahara, dan staf administrasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen laporan keuangan, kebijakan internal lembaga, arsip transaksi, serta literatur akademik yang relevan dengan topik sistem informasi akuntansi dan tata kelola keuangan pendidikan tinggi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan persepsi informan, observasi langsung terhadap proses administrasi dan pelaporan keuangan, serta studi dokumentasi guna memperkuat validitas temuan melalui triangulasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan menyederhanakan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antara penerapan SIA, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi yang dilakukan melalui proses triangulasi sumber untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan. Keabsahan data dijaga dengan mengacu pada empat kriteria dari Lincoln dan Guba (1985), yaitu kredibilitas melalui triangulasi sumber dan *member check*, transferabilitas dengan memberikan deskripsi kontekstual secara rinci, dependabilitas melalui dokumentasi proses penelitian, dan konfirmabilitas dengan menjaga jejak audit (*audit trail*).

Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis SIA dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan tata kelola keuangan berbasis teknologi di PTS di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pengelolaan keuangan di salah satu PTS bidang farmasi di Pontianak masih mengandalkan pencatatan manual berbasis *spreadsheet*. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan, potensi kesalahan pencatatan, lemahnya dokumentasi, serta keterbatasan transparansi bagi pemangku kepentingan. Melalui wawancara dengan lima informan, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika sistem keuangan yang berjalan saat ini.

Pada level strategis, pihak yayasan menekankan pentingnya laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, laporan yang diterima sering kali bersifat ringkasan dan tidak selalu tepat waktu. Seorang perwakilan yayasan menuturkan:

“Kami biasanya menerima laporan saldo dan ringkasan, tetapi detailnya baru menyusul beberapa waktu kemudian. Kondisi ini membuat kami harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan gambaran lengkap.”

Hal ini diperkuat oleh keterangan kepala divisi kepegawaian dan keuangan yang mengonfirmasi bahwa jadwal pelaporan belum berjalan secara rutin:

“Laporan biasanya rampung ketika sudah diminta. Akibatnya, tim keuangan harus bekerja lebih intensif untuk mengejar waktu penyusunan.”

Pada sisi operasional, bendahara bertugas mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta mengumpulkan bukti transaksi. Proses manual yang digunakan menimbulkan risiko inkonsistensi karena revisi pada satu bagian tidak otomatis tercermin pada laporan lain. Bendahara menjelaskan:

“Kalau ada perubahan di kas bendahara, laporan lain harus diperiksa ulang satu per satu. Kadang hasilnya berbeda dengan yang sudah dibuat sebelumnya.”

Setelah dokumen kas bendahara terkumpul, bagian akuntansi dan keuangan melakukan pencatatan lebih lanjut. Kepala bagian akuntansi menegaskan bahwa kendala utama terletak pada dokumentasi bukti transaksi yang tidak selalu tersedia saat laporan disusun:

“Ada kalanya bukti kas datang terlambat, misalnya nota pembelian dari pihak ketiga atau transaksi daring yang belum dicetak. Hal ini membuat laporan harus direvisi setelah selesai disusun.”

Staf teknis keuangan juga menyoroti kompleksitas akibat perbedaan format antar-unit yang mengharuskan proses manual dan berulang:

“Setiap unit memiliki format berbeda. Semua harus disalin manual. Kalau ada revisi, laporan internal bisa sudah berubah, sementara laporan eksternal belum ikut disesuaikan.”

Selain itu, ditemukan adanya dua jenis laporan keuangan yang berjalan paralel: laporan internal sederhana untuk kebutuhan manajemen, dan laporan eksternal yang disusun sesuai PSAK 1 dan ISAK 35. Keduanya tidak saling terhubung sehingga revisi pada satu laporan tidak otomatis tercermin pada laporan lain. Situasi ini menimbulkan kebingungan, khususnya saat laporan final diperlukan untuk audit.

Dari sisi transparansi, akses terhadap laporan keuangan juga masih terbatas. Laporan detail terutama ditujukan untuk internal keuangan dan yayasan, sementara *stakeholder* lain, seperti mahasiswa, orang tua, dan masyarakat, belum memperoleh akses memadai. Kondisi ini membuat keterbukaan informasi belum optimal, meskipun terdapat upaya penyusunan laporan untuk pihak eksternal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada individu atau unit tertentu, melainkan pada absennya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terintegrasi. Sistem manual yang masih digunakan meningkatkan risiko keterlambatan, inkonsistensi, dan keterbatasan transparansi. Temuan ini relevan tidak hanya bagi PTS yang diteliti, tetapi juga dapat menjadi refleksi bagi PTS lain di Indonesia dengan karakteristik serupa.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan transparansi keuangan di PTS tidak semata disebabkan oleh faktor teknis, melainkan terkait erat dengan relasi kekuasaan, budaya organisasi, dan tata kelola. Dari perspektif *Stakeholder Theory*, hak informasi mahasiswa, orang tua, dan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi karena laporan keuangan hanya beredar di internal yayasan. Temuan ini konsisten dengan

(Zulkifli, Sri Langgeng Ratnasari, T. Munzir, 2021) bahwa konflik kepentingan di PTS menghambat *good university governance*. *Agency Theory* menjelaskan terdapat asimetri informasi antara yayasan (*principal*) dan manajemen kampus (*agent*), di mana manajemen menguasai aliran data sehingga yayasan hanya menerima ringkasan. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa kondisi ini membuka peluang *moral hazard*. Dari perspektif *Good Governance Theory*, lemahnya dokumentasi, SOP yang tidak konsisten, dan absennya *cash opname* rutin menandakan bahwa prinsip akuntabilitas belum berjalan optimal (Nurhikmahyanti, 2017).

Temuan ini diperkuat penelitian terdahulu. (Susilo & Aritonang, 2025) menekankan pentingnya faktor sistem dan kompetensi SDM dalam kualitas laporan publik. Revisi berulang dan laporan yang tidak konsisten mendukung temuan (Ekasari et al., 2024) dan (Nasir et al., 2025) bahwa digitalisasi akuntansi meningkatkan akurasi dan akuntabilitas, meskipun konteks penelitian mereka pada koperasi dan UMKM. Hasil ini sejalan dengan (Irenia, Ariefanda Iqbal Perdhana, 2024) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi melalui efisiensi operasional, percepatan komunikasi, dan perluasan akses informasi. Teknologi memungkinkan pengolahan dan penyebaran data secara lebih akurat, sekaligus menjadi respons adaptif terhadap tuntutan lingkungan yang semakin dinamis. Selain itu, budaya organisasi juga menjadi faktor penting. Seperti ditunjukkan (Amalin et al., 2024), peran budaya sebagai moderator keterbukaan informasi; budaya organisasi yang masih menerima praktik manual menjadi hambatan bagi percepatan transformasi digital.

Implikasinya, penerapan SIA terintegrasi diperlukan bukan hanya untuk mempercepat pelaporan dan memperkuat pengendalian, tetapi juga untuk mendukung perubahan budaya organisasi dan tata kelola yayasan. SIA harus dipandang sebagai instrumen strategis yang memperkuat legitimasi sosial PTS melalui transparansi keuangan (Rani & Pratolo, 2024); (Febrianda et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan SIA terintegrasi menjadi faktor utama yang menghambat transparansi dan akuntabilitas di salah satu PTS bidang farmasi di Pontianak. Sistem manual yang masih digunakan menimbulkan keterlambatan, revisi berulang, lemahnya dokumentasi, serta keterbatasan akses informasi bagi *stakeholder*.

Meskipun berfokus pada satu kasus, temuan ini dapat menjadi refleksi bagi PTS lain di Indonesia yang memiliki karakteristik serupa, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya, tata kelola yayasan, dan ketergantungan pada dana mahasiswa. Implikasinya, SIA perlu diposisikan bukan sekadar alat administratif, tetapi instrumen strategis untuk mempercepat pelaporan, memperkuat pengendalian internal, dan membangun legitimasi publik melalui transparansi keuangan.

Penelitian ini juga menyadari keterbatasan, yaitu ruang lingkup studi kasus yang sempit. Karena itu, penelitian lanjutan perlu memperluas cakupan pada lebih banyak PTS atau melibatkan perspektif eksternal, agar pemahaman mengenai peran SIA dalam tata kelola keuangan perguruan tinggi semakin komprehensif.

REFERENSI

- Amalin, F., Noor, M., & Said, R. (2024). *Corporate Governance Mechanisms and Integrity Disclosure : A Conceptual Model with Organizational Culture as a Moderator*. *BizFAME*. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-827-1>
- Astarani, J. (2014). Penggunaan Technology Acceptance Model dalam mengetahui tingkat Penggunaan Informasi Akuntansi pada UKM di Kota Pontianak. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 3(1).
- Ekasari, K., Afandi, A., & Yolandra, A. H. A. (2024). Enhancing Payroll Systems for Accountability and User Experience: A Case Study at Kanindo Cooperative, Malang. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 4(2), 327–340. <https://doi.org/10.54408/jabter.v4i2.404>
- Febrianda, L., Pratolo, S., Yogyakarta, U. M., Information, A., & Institutions, E. (2025). *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 23(1), 29–42.
- Hanida, I., Hamzani, U., & Yunita, K. (2024). Analisis Perspektif Donatur dalam Upaya Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 7(2), 160–170. <https://doi.org/10.51510/jakp.v7i2.1719>
- Irenia, Ariefanda Iqbal Perdhana, E. H. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Tambun Selatan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 720–739. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i2.2323>
- Nasir, M. F., Ginting, B. B., City, M., & Province, N. S. (2025). *Analysis of Accounting Technology Utilization in Advancing Micro , Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan City*. 4(1), 1610–1619.
- Nurhikmahyanti, D. (2017). Mewujudkan Good Governance Pada Perguruan Tinggi. *Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2(1), 24–32.
- Permatasari, C. L., Luhsasi, D. I., & Salsabila, S. S. (2024). Development of Education Accounting Information System. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 7(2), 113–132. <https://doi.org/10.18196/jati.v7i2.22047>
- Rani, R. H., & Pratolo, S. (2024). The Readiness of Private Higher Education Institutions in Indonesia to Adopt Blockchain Technology in Accounting Information Systems. *Maksimum*, 14(2), 257. <https://doi.org/10.26714/mki.14.2.2024.257-274>
- Susilo, J., & Aritonang, R. D. (2025). Pengaruh Sakti, Kompetensi SDM, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Ditjen Paud Dikdasmen. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(7), 2889–2901. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i7.32339>
- Zulkifli, Sri Langgeng Ratnasari, T. Munzir, H. W. N. W. I. (2021). *Good University Governance, Konflik Kepentingan Penyelenggara, dan Pengelola Universitas Swasta*. 10(November), 569–583.